

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik dari pada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan satu sisi, dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan atau hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa ini, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini diterapkan sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendalian untuk seluruh

kegiatan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik desa yang bersangkutan. Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas akuntansi instansi pemerintah desa dapat dijalankan dengan efisien, sesuatu dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah desa.

Akuntansi keuangan desa merupakan suatu hal yang baru dalam akuntansi pemerintah. Akuntansi keuangan desa merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sector publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang me”reformasi berbagai hal termasuk pengelolaan desa.

Pengelolaan akuntansi keuangan desa merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah desa, karena akuntansi keuangan desa dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan.

Penerapan keuangan desa telah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan pemerintah yang sehat. Pemerintah desa dan daerah memiliki wewenang untuk sistem dan prosedur pengelolaan pemerintah desa dalam bentuk peraturan. Salah satunya adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah : hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan , belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dengan diterbitkannya permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 (ayat 6) pengelolaan keuangan desa adalah : Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal untuk masa yang akan datang. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan desa menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban, dan aset.

Dalam penyusunan laporan keuangan pada Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berbasis pada basis kas (cash basic) Basis kas untuk pengakuan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan. Sedangkan basis akrual untuk Neraca bahwa Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh kas desa.

Akuntansi juga merupakan sebuah siklus , artinya terdiri dari beberapa tahapan tertentu dan setelah selesainya tahap tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut.

Menurut IAI KASP Tahun 2015 proses akuntansi atau siklus akuntansi keuangan desa yaitu pertama, tahapan pencatatan merupakan bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai. Kedua, tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Ketiga, tahap pengikhtisaran yaitu dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Keyayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku

besar dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan milik desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam laporan kekayaan milik desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam laporan kekayaan milik desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dan bukti ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar. Keempat, tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi.kegiatan yang dapat dilakukan yaitu membuat laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Laporan kekayaan milik desa, laporan yang berisi posisi aset lancar,dan kewajiban pemerintahan desa per 31 desember tahun tertentu.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan pada Desa Kampar Kecamatan Kampar kabupaten kampar adalah Transaksi-transaksi yang harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan Buku Kas Umum (Lampiran 1), dalam buku kas umum terdapat kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo. Kemudian membuat Buku Pajak (Lampiran 2), Buku Bank (Lampiran 3), Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Desa (Lampiran 4), Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa PerSumberdana (Lampiran 5), Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa (Lampiran 6), untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang

terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 7).

Berdasarkan proses akuntansi selama ini yang dilakukan Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terdapat permasalahan yaitu tidak membuat jurnal umum yang memisahkan antara jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, semua transaksi di catat pada buku kas umum (Lampiran1). Serta tidak memposting ke Buku besar yang merupakan media pencatatan transaksi sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi pada Buku Kas umum dan tidak membuat jurnal penyesuaian. Masalah lain yaitu tidak dilakukannya penyusutan aset tetap dalam laporan kekayaan milik desa (Lampiran 7).

Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, adalah sebagai berikut: Pendapatan desa, Pendapatan asli desa, pendapatan transfer, belanja desa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal terdiri atas peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

Berdasarkan uraian diatas serta beberapa penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut : **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

“Apakah Penerapan Akuntansi keuangan Pada Pemerintahan Desa Kamar Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Kamar Kecamatan Kamar Kabupaten kamar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat disimpulkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang ilmu akuntansi secara umum, dimana penulis dapat melihat secara langsung pengelolaan keuangan desa di desa kamar kecamatan kamar kabupaten kamar.
- b. Bagi Desa kamar Kecamatan Kamar kabupaten kamar hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi pemerintah desa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama pada tempat yang berbeda.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi pada Dana Desa Kampar Kecamatan Kampar, akan di bagi menjadi tiga bab sebagai berikut:

BAB I : Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi telaah pustaka dan hipotesis, telaah pustaka berisi penjelasan mengenai pengertian akuntansi, akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintah, teknik akuntansi pemerintah, laporan keuangan, sistem akuntansi, dan sistem akuntansi pemerintah pusat.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampar kabupaten kampar, yang meliputi sejarah singkat, struktur organisasi serta visi dan misi.

BAB V : Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang diberikan